



ASAL USUL

Sensor



/ Kompas Images

Minggu, 9 Maret 2008 | 03:25 WIB

Ariel Heryanto

Salah satu benteng propaganda pemerintah Orde Baru yang masih bertahan adalah Lembaga Sensor Film. Gugatan Masyarakat Film Indonesia (MFI) terhadap lembaga sensor dapat dipahami sebagai bagian dari sejarah panjang gerakan prodemokrasi.

Lebih dari satu tokoh MFI yang berpendapat lembaga sensor sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut hemat saya, perlu dirumuskan lebih tegas bahwa lembaga sensor itu tidak pernah cocok dengan zaman dan masyarakat mana pun. Sensor bertentangan dengan harkat kemanusiaan seperti yang dimuliakan oleh konstitusi dan filsafat dasar didirikannya Republik ini.

Sayang, gugatan MFI mudah dan sudah beberapa kali disalahpahami pihak lain. Ini bukan sepenuhnya salah MFI. Propaganda ideologi Orde Baru masih bergentayangan dalam ruang publik. Jelas ada pihak yang tidak akan pernah mau menerima usulan MFI karena kepentingan mereka terancam. Tapi juga ada yang mungkin kesulitan mencerna gagasan MFI.

Mereka termakan takhayul tanpa lembaga sensor masyarakat akan kacau-balau. Jika Lembaga Sensor dibubarkan, dibayangkan akan terjadi kemerosotan moral dalam masyarakat. Padahal yang terjadi selama ini mungkin sebaliknya. Berbagai penyakit moral dan peradaban dalam masyarakat bisa jadi berlarut-larut karena aneka sensor dalam berbagai bentuk dan istilah.

Berbagai takhayul lain sudah ditelanjangi ke-takhayul-annya. Dulu ada takhayul masyarakat harus mengabdikan mutlak pada raja yang konon penjelmaan dewa. Seakan-akan tanpa raja dan kerajaan, jagad raya akan hancur dalam kiamat. Ternyata tidak ada kiamat ketika raja-raja ini digantikan oleh pendaftar dari benua Eropa di tanah jajahan. Lalu tersebar takhayul baru dunia harus dipimpin orang-orang modern yang biasanya lelaki, berkulit putih, bermodal ilmu dan teknologi.

Kekuasaan para penjajah ini direbut oleh gerakan nasionalis-Islam-komunisme yang

BERI[ASA](#)
[I Ge](#)
[Kap](#)
[Say](#)
[Tim](#)
[Trar](#)
[Sen](#)
[Peni](#)

Diunduh dari <arielheryanto.wordpress.com>

mendirikan bangsa merdeka dan negara berdaulat. Tetapi selama berpuluh tahun kemudian kemerdekaan itu dikuasai raja-raja baru dari kalangan militer. Sejak saat itu beredarlah takhayul tanpa pemerintahan militer negara ini akan hancur.

Surat

Majalah

Kaum lelaki beramai-ramai dilatih bermimpi menjadi super-maskulin sementara kaum wanita dididik lebih menghamba pada kaum pria. Kebudayaan dari bangsa lain digambarkan sebagai ancaman. Beredar takhayul tentang pentingnya sensor untuk menjamin keaslian jati diri bangsa Indonesia. Sensor menjamin jangan sampai ada yang menggugat apalagi menelanjangi ke-takhayul-an ideologi yang dikeramatkan untuk melindungi kepentingan penguasa.

Pener

Media

Indusi

MFI usul agar Indonesia memakai sistem klasifikasi film untuk menggantikan sistem sensor. Dalam pemahaman saya, jika usulan ini diterima setiap film akan diberi label peringatan tentang tingkat kekerasan, seksual, kepekaan keagamaan atau politis dalam film tersebut. Tidak ada film yang dilarang beredar atau dicincang sampai cacat. Orang tidak dilarang untuk menontonnya, tetapi diingatkan risikonya sebelum menonton. Publik dididik bersikap kritis. Tapi keputusan menonton film macam apa, kapan, dan mengapa tetap milik konsumen dan lembaga sosial lain seperti keluarga.

Hotel

Ini mirip peredaran rokok, obat-obatan, atau makanan. Rokok dijual dengan label peringatan: merokok bisa membahayakan kesehatan. Tetapi rokok tidak dilarang beredar. Ada obat yang diberi label: minum obat ini bisa menyebabkan rasa mengantuk. Bagaimana kalau ada yang minum obat ini, mengantuk, mengemudikan mobil, lalu menabrak. Apakah obat semacam itu harus dilarang?

Usulan MFI mengajak setiap warga negara dewasa melindungi diri sendiri dan juga anak-anak yang mereka asuh agar terlindung dari hal-hal yang mereka anggap tidak baik. Sambil tetap menghormati pihak lain yang berbeda selera dan kebutuhan.

Inilah soalnya. Tidak semua pejabat siap bila bangsa ini menjadi cerdas dan dewasa. Juga tidak semua di antara kita sendiri siap menjadi dewasa secara moral, politis, dan sosial. Lebih dari 30 tahun hak dewasa dimonopoli negara. Negara itu sendiri dimonopoli segerombolan kecil elite.

Kita terbiasa disuapi propaganda tentang apa yang baik dan buruk secara seragam. Terbiasa manja dan malas berpikir, apalagi bertanggung jawab atas pilihan apa yang kita tonton di televisi atau bioskop. Kita kurang terdidik menghargai kemajemukan: apa yang baik untuk kita belum tentu baik untuk yang lain dan sebaliknya.

Mungkin dibutuhkan sebuah paradoks. Kita tetap butuh "gunting sensor", untuk menggunting pembodohan, pemanjaan, pemalasan masyarakat. Kita perlu sensor terhadap berbagai takhayul tentang perlunya Lembaga Sensor dan berbagai produk hukum yang melecehkan pendewasaan bangsa.

Kita perlu sensor untuk memangkas bahaya keangkuhan sejumlah kecil orang yang bisa-bisanya merasa punya moralitas super, merasa mampu serta berhak secara sepihak menentukan film dan acara televisi apa yang baik atau tidak baik ditonton bangsa keempat terbesar di dunia ini.